



Analysis of Halal Economic Leverage: Policy Translation to West Java

Analisis Komponen Pengungkit Ekonomi Halal: Translasi Kebijakan Ke Jawa Barat

Frendy Ahmad Afandi¹

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, Jakarta, Indonesia
Email correspondence: frendystp@gmail.com

ABSTRACT

The halal economy is a development priority as stated in the 2nd National Priority of the 2025-2029 RPJMN. It is expected as a new engine of national economic growth as mentioned in the 2nd Asta Cita. To formulate evidence-based policies in Halal Economics, it is necessary to map the leverage sectors through the Social Accounting Matrix (SAM). West Java as the province with the largest population needs to implement halal economic policies to increase economic growth. Therefore, policy translation from national data to West Java Province was carried out. The analysis was carried out using Indonesian standard classification of business fields (KBLI) which is included in halal GDP, consists of 8 clusters, namely halal food and beverages; Muslim-friendly tourism; apparel and Muslim fashion; sharia media and recreation; halal pharmaceutical and health facility preparations; renewable energy; Islamic finance; and other. Furthermore, the 2016 input-output table was concordance with the cluster in halal GDP. It is carried out using the KBLI 2015 and 2020. Furthermore, analysis of forward linkage, backward linkage, and the impact of sector multipliers (output, income, and labor) was carried out. The final stage is the translation of policy recommendations with the conditions in West Java.

Keywords:

key sectors; leverage component; policy translation; west java

ABSTRAK

Ekonomi syariah dan halal kini menjadi prioritas pembangunan sebagaimana tercantum pada Prioritas Nasional ke-2 RPJMN 2025-2029. Ekonomi syariah juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan pada Asta Cita ke-2. Untuk dapat merumuskan kebijakan presisi berbasis bukti di bidang Ekonomi Syariah diperlukan pemetaan sektor pengungkitnya melalui analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar perlu mengimplementasikan kebijakan ekonomi syariah untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dilakukan translasi kebijakan dari data nasional ke Provinsi Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan KBLI yang masuk pada PDB Syariah, yang terdiri dari 8 klaster, yaitu makanan dan minuman halal; pariwisata ramah muslim; tekstil, kulit, dan fesyen muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan syariah; dan syariah lainnya. Selanjutnya dilakukan konkordansi tabel input output 2016 keluaran BPS 2021 dengan klaster pada PDB syariah. Konkordansi dilakukan dengan bantuan Tabel Kesesuaian KBLI 2020-KBLI 2015. Selanjutnya dilakukan analisis *forward linkage*, *backward linkage*, dan dampak *multiplier* sektor terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja. Tahap akhir dilakukan translasi rekomendasi kebijakan dengan kondisi keragaan data dan kebijakan di Jawa Barat.

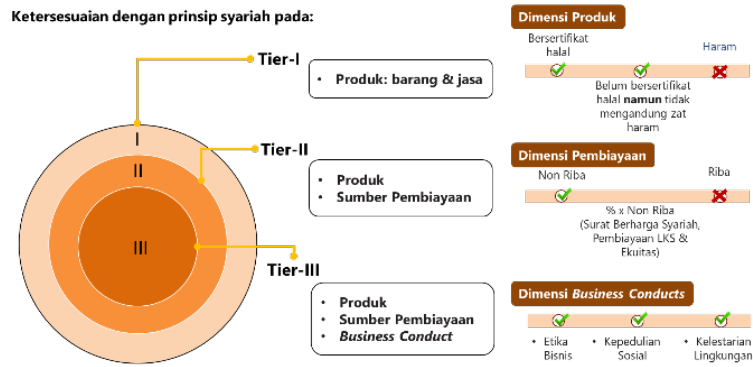
Kata Kunci:

komponen pengungkit; sektor unggulan; translasi kebijakan; Jawa Barat

PENDAHULUAN

PDB Syariah merupakan nilai tambah perekonomian yang dihitung dari seluruh pelaku sektor dalam perekonomian syariah. Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia karena menurut laporan dari Salaam Gateway dan DinarStandard, jumlah produsen halal di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia di antara 57 negara anggota OKI. Selain itu, Indonesia berperan dominan dalam industri halal yang meliputi makanan halal, farmasi, kosmetik, dan keuangan syariah. Sebanyak 15 dari 30 perusahaan produsen halal terkemuka dunia pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Ekonomi halal diyakini mampu melepaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah melalui konsumsi kelas menengah (Fischer dan Nisa, 2025).

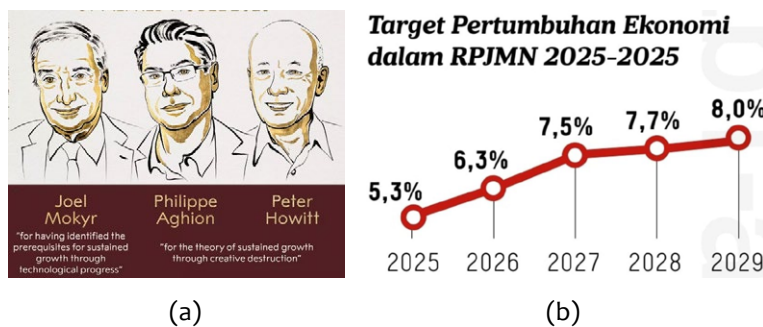
Pada tahun 2019, PDB syariah awalnya dihitung dengan mengurangi PDB nasional dengan nilai PDB non-halal, seperti minuman beralkohol, perjudian, diskotik, dan narkoba (Yildirim et al., 2018). Alhasil, kontribusi syariah diperkirakan sebesar 80%. Namun, dari waktu ke waktu perhitungan PDB syariah dihitung lebih baik lagi melalui metode survei. Alhasil, kontribusi PDB syariah pada tahun 2023 sebesar 47%. Kontribusi PDB syariah dalam RPJMN 2025-2029 menggunakan baseline 2024 sebesar 46,27% (2023), dengan target 49,04% pada 2025 dan 56,11% pada 2029.



Gambar 1. Dimensi kriteria perhitungan PDB syariah

Sumber: BPS (2025a)

Literatur sebelumnya tentang sektor *leverage* PDB syariah masih menggunakan metodologi deskriptif dan survei. Almas dkk. (2024) menggunakan analisis bibliometrik untuk menyelidiki industri halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Jailani dan Adinugraha (2022) menggunakan tinjauan literatur terhadap gaya hidup halal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menne et al. (2023) Menggunakan metodologi survei untuk menganalisis dampak keuangan syariah untuk mendukung ekonomi syariah. Firdaus (2025) menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dampak mekanisme keuangan syariah untuk mendukung ekonomi halal di Indonesia. Qizam dkk.(2024) Menggunakan model kuadrat terkecil parsial untuk membuktikan rantai nilai halal dapat berdampak pada perekonomian nasional. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor *leverage* PDB syariah dan dampak dari *multiplier effect*-nya serta mentranslasikannya ke kebijakan syariah daerah di Jawa Barat. Kontribusi analisis terhadap kebijakan daerah adalah dapat digunakan sebagai *evidence based* perbandingan antara pengimplementasian rekomendasi kebijakan berbasis ekonomi halal dan konvensional sehingga Pemprov Jawa Barat dapat mengambil kebijakan ekonomi halal secara presisi. Fokus kajian yaitu: (i) analisis SNSE nasional dengan kerangka PDB syariah; selanjutnya (ii) ditranslasikan ke konteks pembangunan ekonomi syariah di Jawa Barat.



Sumber: Kompas (2025)

Gambar 2. (a) Penerima Nobel Ekonomi 2025 menekankan pentingnya ilmu, teknologi, dan inovasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (b) target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai

Kesenjangan penelitian adalah belum ada kajian yang analisis mana yang memanfaatkan ekonomi sektor menggunakan klasifikasi PDB syariah. Perbedaan kajian saat ini dengan pekerjaan sebelumnya adalah delapan kluster PDB syariah terdiri dari 1722 KBLI yang dapat dikelompokkan menjadi 171 sektor ekonomi (dalam tabel *input-output* 185 sektor). Analisis sektor pendorong PDB syariah dapat dipetakan dengan membuat konkordansi antara kluster PDB syariah dengan 185 sektor ekonomi dengan bantuan tabel kesesuaian kode KBLI 2020 dengan KBLI 2015 (BPS, 2021), mengingat tabel IO dari 185 sektor *output* tahun 2020 mengacu pada KBLI 2015 sedangkan referensi PDB syariah mengacu pada KBLI 2020 (BPS, 2025b). Penjelasan mudahnya, tabel *input-output* (I-O) adalah alat utama untuk menganalisis hubungan antar-sektor ekonomi. Tabel ini mencatat transaksi barang dan jasa antar-sektor produksi, impor, ekspor, serta permintaan akhir (seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan pemerintah). BPS merilis tabel I-O secara berkala, dengan edisi terbaru untuk tahun 2020 (dirilis pada Januari 2025), yang mencakup klasifikasi hingga 185 produk atau 17 lapangan usaha. Setiap produk terdiri dari beberapa



rincian unsur usaha yang dijelaskan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Contoh produk 1 pada tabel I-O adalah produk padi, di dalamnya terdapat 2 KBLI, yaitu padi hibrida dan padi inbrida.

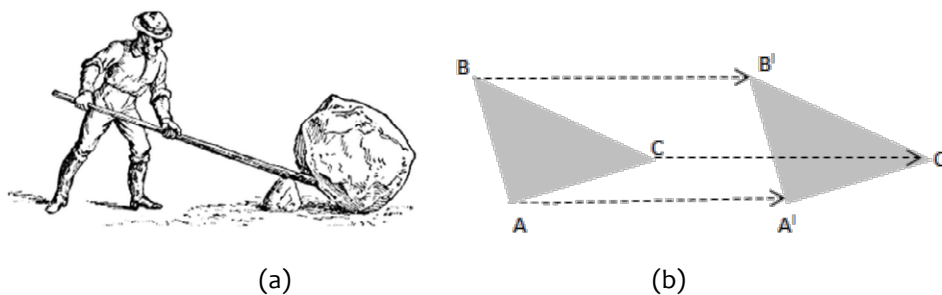
METODOLOGI

Pertanyaan penelitian adalah 1) apa sektor *leverage* PDB syariah; 2) berapa banyak efek penggandanya. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Pendekatan SNSE secara teoritis adalah analisis lanjutan dari Tabel IO yang menganalisis sektor *leverage*, *forward linkage*, *backward linkage*, dan memungkinkan pelacakan distribusi pendapatan berdasarkan kelompok institusi (rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah) (Sahara, 2020). Jadi, metode yang dikombinasikan dengan perspektif PDB syariah berdasarkan KBLI, dapat menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

Tabel 1. Kerangka dasar Tabel IO

Alokasi Output			Permintaan antara				Permintaan Akhir	Jumlah Output	
			Sektor Produksi						
Susunan Input			1	2	...	n			
Input Antarkategori	Sektor	1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	F_1	X_1	
		2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	F_2	X_2	
	
	
		n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	F_n	X_n	
Jumlah Input Primer			v_1	v_2	...	v_n			
Jumlah Input			x_1	x_2	...	x_n			

Sumber: Sahara (2020)



Gambar 3. (a) Ilustrasi pengungkit dengan menggunakan tenaga yang kecil (sektor unggulan) untuk mengangkat benda yang besar (pertumbuhan ekonomi); (b) Ilustrasi translasi kebijakan yang ada di level nasional untuk diterjemahkan ke level provinsi Jabar

Tabel IO yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabel IO 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Tabel IO yang digunakan adalah 185x185. Data lain yang digunakan adalah PDB dan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2022. Tahapan pembuatan analisis SNSE menggunakan Microsoft Excel 2019 adalah sebagai berikut: 1) menyusun tabel matriks berukuran 185x185, 2) membuat matriks identitas, 3) membuat matriks A (koefisien teknologi/APE-Average Prospercity to Expenditure), 4) membuat matriks IA, 5) membuat matriks pengganda (Ma), dan 6) membuat tabel analisis yang diperlukan (Machmud, 2020).

Analisis dampak (*forward linkage* dan *backward linkage*) diukur berdasarkan *backward linkage index* (BLI) dan *forward linkage index* (FLI). Rumus untuk menghitung BLI dan FLI adalah sebagai berikut.

$$IBL_j = \frac{\sum_{i=1}^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} n \qquad IFL_i = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} n$$

Keterangan:

IBL_j: Indeks keterkaitan mundur untuk sektor j

IFL_i: Indeks keterkaitan ke depan untuk sektor i

b_{ij}: elemen terbalik dari matriks Leontif, baris i dan kolom j

n: Jumlah sektor

i : jumlah sektor berturut-turut (struktur input)
 j : Jumlah sektor dalam kolom (struktur permintaan)



Gambar 4. Kerangka metodologi penelitian yang menggunakan analisis SNSE dan penggunaan komponen PDB syariah (tabel IO nasional) yang disesuaikan dengan konteks pembangunan ekonomi syariah di Jabar (tabel IO Jawa Barat dan Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020)

Analisis pengganda mengukur efek total terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja ketika ada peningkatan satu unit input terhadap output industri tertentu. Untuk menghitung nilai pengganda yang diperlukan dari matriks Leontif, persamaan model I – O Leontif dapat ditulis sebagai berikut:

$$X = (IA)^{-1}Y$$

Di mana X adalah vektor keluaran, Y adalah vektor permintaan akhir, I adalah matriks identitas, A adalah matriks koefisien input dan $(IA)^{-1}$ adalah matriks terbalik Leontif. Rumus dari ketiga jenis pengganda adalah sebagai berikut: $\Delta X = (IA)^{-1} \Delta Y$, di mana $\Delta Y = I$, kemudian:

$$O_j = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

$$I_j = \sum_{i=1}^n a_{n+1,i} b_{ij}$$

$$L_j = \sum_{i=1}^n w_{n+1,i} b_{ij}$$

Keterangan:

O_j : pengganda keluaran

I_j : pengganda pendapatan

L_j : pengganda tenaga kerja

$a_{n+1,i}$ adalah rasio antara upah/pendapatan dibagi dengan total input

$w_{n+1,i}$ adalah rasio tenaga kerja dibagi dengan total input

PDB Syariah (kerangka penelitian) mencakup 8 kluster/sektor ekonomi atau bidang usaha, yaitu makanan dan minuman halal; Pariwisata ramah Muslim; tekstil, kulit, dan mode Muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan Islam; dan syariah lainnya (BPS, 2025; KNEKS, 2025). Kluster pertama terdiri dari 3 subkluster, yaitu hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan halal; industri makanan dan minuman halal; dan penyediaan makanan dan minuman halal. Kluster ketiga terbagi menjadi 4 subkluster, yaitu industri tekstil halal; industri pakaian jadi halal; industri kulit, barang-barang kulit, dan alas kaki; serta desain busana Muslim. Kluster 5 dibagi menjadi 2 subkluster, yaitu sediaan farmasi dan kosmetik halal serta fasilitas pelayanan kesehatan syariah. Kluster 7 dikelompokkan menjadi 6 subkluster, yaitu layanan perantara keuangan syariah; asuransi, dana pensiun, dan jaminan sosial wajib syariah; layanan keuangan syariah lainnya; layanan dukungan keuangan syariah; dana sosial syariah; dan badan pengelola dana haji (Gambar 5).



1.722
KBLI Syariah

224
Non-Sharia KBLI

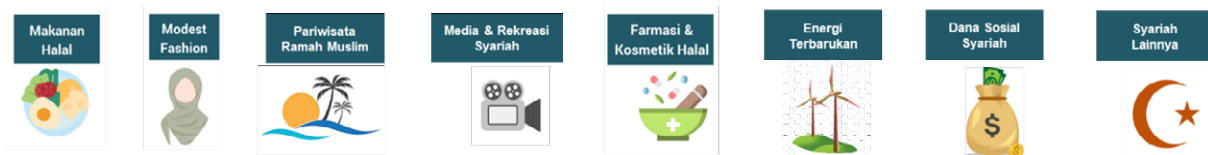
CLUSTER	SUB CLUSTER	SUM KBLI
CLUSTER 1. Halal Food and Beverage	1a. Halal Agricultural, Forestry and Fisheries Products	96
	1b. Halal Food and Beverage Industry	107
	1c. Halal Food and Beverage Preparation	10
CLUSTER 2. Muslim-Friendly Tourism		139
CLUSTER 3. Muslim Textiles, Leather and Fashion	3a. Halal Textile Industry	30
	3b. Halal Apparel Industry	9
	3c. Leather Industry, Leather Goods and Footwear	10
	3d. Muslim Religious Designs	3
CLUSTER 4. Sharia Media and Recreation		110
CLUSTER 5. Halal Pharmaceutical Preparations and Health Facility Preparations	5a. Halal Pharmaceutical and Cosmetic Preparations	9
	5b. Sharia Health Service Facilities	13
CLUSTER 6. Renewable Energy		5
CLUSTER 7. Sharia Finance	7a. Sharia Financial Intermediary Services	9
	7b. Insurance, Pension Fund and Sharia Compulsory Social Security	13
	7c. Other Sharia Financial Services	14
	7d. Sharia Financial Support Services	61
	7e. Sharia Social Fund	1
	7f. Hajj Fund Management Agency	1
CLUSTER 8. Other Sharia		1082
CLUSTER 9. Non-Sharia		224

Gambar 5. Cakupan KBLI dalam ekonomi syariah

Sumber: BPS (2025a)

HASIL

Klaster I, makanan dan minuman halal, yaitu hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan halal; industri makanan dan minuman halal; Penyediaan makanan dan minuman halal. Klaster ini meliputi bahan baku, industri manufaktur, dan jasa makanan halal. Sektor pendorong (indeks keterkaitan mundur >1 dan indeks keterkaitan maju >1 (Nugroho, 2021)) adalah unggas dan hasilnya (sisi hulu); minyak hewani dan nabati, gula (industri manufaktur/sisi hilir); dan penyediaan makanan dan minuman (layanan).



Gambar 6. Tujuh klaster utama PDB syariah

Klaster II, pariwisata ramah muslim merupakan sektor potensial yang menyediakan kebutuhan wisatawan muslim saat bepergian sehingga menciptakan kenyamanan. Sektor yang digenjut adalah jasa transportasi darat selain kereta api, jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, serta layanan penyiaran dan pemrograman, film dan rekaman suara.

Klaster III, tekstil, kulit, dan fesyen muslim, yaitu, industri tekstil halal; industri pakaian jadi halal; industri kulit, barang kulit, dan alas kaki; dan desain busana muslim. Sektor-sektor yang menjadi sektor penyesuaian (indeks keterkaitan mundur <1 dan indeks keterkaitan ke depan >1) adalah tekstil; pakaian jadi, barang kulit, alas kaki; dan jasa profesional, ilmiah, dan teknis.

Klaster IV, media dan rekreasi syariah, adalah konten media dan hiburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Istilah lainnya adalah gaya hidup halal yang merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif. PDB ekonomi kreatif sendiri berkontribusi 7,0% pada tahun 2021 dan menyerap 21,9 juta tenaga kerja atau 16,7% dari total tenaga kerja (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Sektor ini merupakan sektor terbesar ketiga yang merupakan pengeluaran konsumen muslim berdasarkan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2021*. Sektor *leverage* adalah kertas; barang-barang dari kertas dan karton; layanan penyiaran dan pemrograman, film, dan perekaman suara; dan layanan konsultasi komputer dan teknologi informasi. LPEM UI (2023) mencatat ada 5 subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan global tertinggi, yaitu seni pertunjukan (16,8%), pengembang aplikasi dan game (13,3%), seni rupa rupa (12,6%), desain produk (12,5%), dan musik (11,8%).

Klaster V, sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan yang meliputi sediaan farmasi dan kosmetik halal serta fasilitas pelayanan kesehatan syariah. Sektor *leverage* hanya dalam persiapan farmasi dan kosmetik halal, yaitu barang kimia lainnya serta penyediaan makanan dan minuman. Pada bagian ini, diperlukan dukungan untuk memperkuat metode atau instrumen deteksi halal cepat atau ilmu halal yang berkualitas (Ghufron, 2022).

Klaster VI, energi terbarukan yang bersinggungan dengan ekonomi syariah dalam hal prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian syariah berperan penting dalam mendukung transisi energi hijau seperti melalui sukuk hijau, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah. Sektor *leverage* adalah kimia dasar kecuali pupuk dan listrik.

Tabel 2. Analisis sektor unggulan dari 8 klaster PDB syariah

Nama Sektor	Kode Sektor	BLI	FLI	Output	Income	Labour
1 Makanan dan Minuman Halal						
1a Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Halal						
Unggas dan Hasil-hasilnya	028	1.29	1.00	1.60	1.29	1.17
1b Industri Makanan dan Minuman Halal						
Minyak Hewani dan Minyak Nabati	058	1.86	1.30	2.09	6.85	19.16
Gula	065	1.03	1.05	1.69	2.14	3.53
1c Penyediaan Makanan dan Minuman Halal						
Penyediaan Makan dan Minum	165	1.09	1.16	1.86	1.81	2.05
2 Pariwisata Ramah Muslim						
Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel	158	2.82	1.04	1.66	2.11	1.97
Jasa Angkutan Laut	159	1.05	1.18	1.89	2.79	2.49
Jasa Angkutan Udara	161	1.41	1.11	1.79	1.92	1.74
Jasa Penyiaran dan pemrograman, Film dan Hasil Perekaman Suara	167	1.79	1.02	1.64	1.70	3.08
3 Tekstil, Kulit, dan Fesyen Muslim						
3a Industri Tekstil Halal						
3b Industri Pakaian Jadi Halal						
3c Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki						
3d Desain Fesyen Muslim						
4 Media dan Rekreasi Syariah						
Kertas	091	1.17	1.01	1.61	1.69	2.05
Barang-Barang Dari Kertas Dan Karton	092	1.24	1.21	1.94	2.16	2.65
Jasa Penyiaran dan pemrograman, Film dan Hasil Perekaman Suara	167	1.79	1.02	1.64	1.70	3.08
Jasa Konsultasi komputer dan teknologi informasi	169	1.15	1.04	1.67	1.63	2.37
5 Sediaan Farmasi Halal dan Sediaan Fasilitas Kesehatan						
5a Sediaan Farmasi dan Kosmetik Halal						
Barang-barang kimia lainnya	104	1.01	1.02	1.63	1.62	2.10
Penyediaan Makan dan Minum	165	1.09	1.16	1.86	1.81	2.05
5b Fasilitas Pelayanan Kesehatan Syariah						
6 Energi Terbarukan						
Kimia Dasar Kecuali Pupuk	096	2.80	1.08	1.73	4.48	5.35
Listrik	145	2.39	1.21	1.95	3.06	3.81
7 Keuangan Syariah						
7a Jasa Perantara Keuangan Syariah						
7b Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Wajib Syariah						
7c Jasa Keuangan Syariah Lainnya						
7d Jasa Penunjang Keuangan Syariah						
7e Dana Sosial Syariah						
Jasa Pemerintahan Umum	177	1.19	1.05	1.69	1.34	1.43
7f Badan Pengelola Dana Haji						
8 Syariah Lainnya						
Makanan Hewan Olahan	072	1.58	1.13	1.81	7.12	16.94
Kertas	091	1.17	1.01	1.61	1.69	2.05
Barang-Barang Dari Kertas Dan Karton	092	1.24	1.21	1.94	2.16	2.65
Kimia Dasar Kecuali Pupuk	096	2.80	1.08	1.73	4.48	5.35
Pupuk	097	1.71	1.10	1.77	2.43	2.36
Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis	098	1.50	1.01	1.62	2.32	2.68
Karet Remah dan Karet Asap	108	1.38	1.19	1.91	4.89	12.99
Barang-Barang dari Plastik	110	1.35	1.19	1.90	2.03	2.22
Logam Dasar Bukan Besi	115	1.16	1.20	1.93	4.61	3.43
Listrik	145	2.39	1.21	1.95	3.06	3.81
Bangunan Tempat Tinggal Dan Bukan Tempat Tinggal	149	1.12	1.15	1.85	1.84	2.13
Jasa Angkutan Laut	159	1.05	1.18	1.89	2.79	2.49
Jasa Angkutan Udara	161	1.41	1.11	1.79	1.92	1.74
Jasa Penunjang Angkutan	162	1.49	1.00	1.60	1.55	1.43
Jasa Konsultasi komputer dan teknologi informasi	169	1.15	1.04	1.67	1.63	2.37
Jasa Pemerintahan Umum	177	1.19	1.05	1.69	1.34	1.43

Klaster VII, keuangan syariah, yaitu layanan perantara keuangan syariah; asuransi, dana pensiun, dan jaminan sosial wajib syariah; layanan keuangan syariah lainnya; layanan dukungan keuangan syariah; dana sosial syariah; dan lembaga pengelola dana haji. Sektor *leverage* hanya ada di dana sosial syariah (ZISWAF) c.q layanan pemerintah umum. Komposisi pangsa pasar keuangan pada tahun 2021 adalah 90,11% keuangan konvensional dan 9,89% keuangan syariah (KNEKS, 2021). Balli dkk. (2022) menunjukkan bahwa keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional memiliki risiko ekuitas yang lebih rendah dalam jangka panjang dengan informasi pasar yang membaik.



Klaster VIII, syariah lain yang tidak tercakup dalam 7 klaster di atas. Sektor *leverage* adalah pakan ternak olahan; kertas; barang-barang dari kertas dan karton; kimia dasar kecuali pupuk; pupuk; resin sintetis, bahan plastik, dan serat sintetis; karet remah dan karet asap; barang-barang plastik; logam dasar non-besi; listrik; bangunan tempat tinggal dan non-tempat tinggal; layanan transportasi laut; layanan transportasi udara; layanan dukungan transportasi; jasa konsultasi komputer dan teknologi informasi; dan layanan pemerintah umum.



Gambar 7. Rekomendasi pemanfaatan PDB syariah

DISKUSI

Untuk melihat kinerja ekonomi syariah di tingkat internasional dilihat dari pemeringkatan SGIE. Komponen yang menyusunnya adalah pembiayaan/pembiayaan syariah, makanan halal, pariwisata ramah Muslim, *fashion*, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal. Kelima sektor tersebut dinilai sebagai sektor unggulan yang mendukung industri halal global (KNEKS, 2023). Strategi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di SGIE adalah dengan fokus pada keuangan syariah (ZISWAF), makanan halal (unggas dan produknya, industri kelapa sawit, gula, dan penyediaan makanan dan minuman), pariwisata ramah Muslim, media & rekreasi syariah, serta farmasi dan kosmetik halal.

Tabel 3. Program pendukung sektor halal di Jawa Barat

No.	Sektor Halal	Program
1.	Makanan dan Minuman Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi halal produk makanan dan minuman • Sertifikasi halal rumah potong hewan (RPH) • Promosi perdagangan dalam dan luar negeri (pameran)
2.	Fesyen Muslim	<ul style="list-style-type: none"> • Festival busana muslim (Muslim Fashion Depok, Cirebon Halal Festival, Subang) • Promosi perdagangan dalam dan luar negeri (pameran) • Peningkatan teknologi industri terkait produk bersih
3.	Pariwisata Ramah Muslim	Pembentukan kota/ kabupaten halal di Cirebon

Sumber: KNEKS (2020)

Fokus kebijakan ekonomi syariah dan industri halal di Jawa Barat ada 4, yaitu penguatan ekonomi industri halal terintegrasi, inklusi keuangan syariah untuk UMKM, pengembangan pariwisata halal berbasis ekonomi hijau, dan peningkatan daya saing fesyen halal berbasis keberlanjutan. Pemprov Jabar mendukung pembangunan Jababeka *Halal Industrial Clusters* di Cikarang sebagai salah satu dari 4 kawasan halal nasional (diumumkan Pleno KNEKS 2024). Fokus pada rantai pasok halal untuk makanan, kosmetik, farmasi, dan fesyen, dengan insentif pajak syariah bagi UMKM. Pada 2024, sektor industri halal di Jawa Barat tumbuh 1,94% (y-on-y), mendukung PDB provinsi hingga 15-20%. Program sertifikasi dan pemberdayaan UMKM halal yang dilakukan Pemprov Jabar dengan meluncurkan program sertifikasi halal gratis untuk UMKM sejak 2023, terintegrasi dengan *platform* digital seperti *Sharia Mall* Jabar. Pemprov Jabar juga mengembangkan eco-tourism halal di Pangandaran, Garut, dan Lembang sejak 2024, dengan sertifikasi green halal untuk hotel dan restoran. Selain itu, dukungan untuk Jabar *Halal Fashion Week* tahunan dan inkubator desain syariah untuk fesyen muslim berkelanjutan.

Regulasi tingkat daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah ada empat (KNEKS 2020). Pertama, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 tentang "Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal". Kedua, Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi Halal, Pergub tentang Tim Percepatan Pariwisata Ramah

Muslim, Pergub No. 70 Tahun 2015 tentang Dana Sosial Keagamaan. Ketiga, *Masterplan/ Blueprint* Pengembangan Keuangan Syariah Daerah berupa Kebijakan Ekonomi Syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Provinsi Jawa Barat dan implementasi pada perencanaan pembangunan. Keempat, *roadmap* pengembangan ekonomi syariah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Konsorsium *Halal Center* yang terdiri dari 17 Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Pembentukan Konsorsium ini merupakan wujud pengembangan *halal value chain* termasuk riset sains halal untuk memperkuat perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Praktik terbaik dalam industri halal di Jawa Barat memerlukan 3 hal, yaitu kolaborasi antar stakeholder untuk percepatan sertifikasi halal melalui sistem digital, sertifikasi SDM dan manajemen pengelola yang menjamin kriteria dan *awareness* halal, dan peningkatan efektivitas institusi & industri melalui *branding, market channeling, insentif* pelatihan (KNEKS 2020).

Tabel 4. *Capaian utama Jabar yang menjadi dasar juara umum Anugerah Adinata Syariah 2025*

Kategori Penghargaan	Peringkat Jawa Barat	Capaian Kunci
Industri Halal	Juara 1	- Jumlah produk bersertifikat halal terbanyak nasional: 694.684 produk (termasuk <i>self-declare</i>). - Sertifikasi halal gratis untuk 1.000 UMKM pada 2024-2025. - Ekspor makanan/minuman halal USD 4,8 miliar dan obat halal USD 243 juta (2023, dengan pertumbuhan 15% YoY hingga 2025). - Pengembangan Kawasan Industri Halal Jawa Barat untuk hilirisasi komoditas.
Keuangan Sosial Syariah (Zakat, Infaq, Sedekah/ZIS)	Juara 1	- Pengumpulan ZIS mencapai Rp 6,5 triliun (2023), naik 20% YoY hingga 2025. - Program distribusi ZIS untuk pemberdayaan mustahik di 27 kabupaten/kota. - Integrasi <i>platform</i> digital ZIS dengan aplikasi Jawa Barat untuk transparansi dan inklusi.
Pariwisata Syariah	Juara 1	- Peringkat 1 nasional Indonesia <i>Muslim Travel Index</i> (IMTI) 2025. - 10 destinasi wisata syariah (termasuk hotel dan restoran <i>halal-friendly</i>). - Peningkatan kunjungan wisatawan Muslim 15% YoY (2023-2025) melalui program <i>Smiling West Java Muslim Friendly Tourism</i> (SWJ-MFT).
Keuangan Syariah	Juara 2	- Total aset keuangan syariah Rp 15 triliun (2023), pangsa pasar 15% terhadap konvensional. - 12 bank syariah dan 25 lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) aktif. - Pembiayaan proyek via Sukuk Negara Syariah (SBSN) untuk 315 proyek senilai Rp 17,8 triliun (2013-2023).
Inkubasi Usaha Syariah	Juara 2	- 6 inkubator bisnis syariah aktif, mendukung 500+ UMKM syariah. - Program pelatihan dan pendanaan untuk <i>startup</i> halal, dengan tingkat kelangsungan usaha 85%.
Zona KHAS (Kuliner Halal, <i>Healthy, Aman, Sehat</i>)	Juara 2	- 3 kawasan KHAS dikembangkan, mencakup 500+ usaha kuliner halal. - Sertifikasi zona untuk 1.500 usaha target (2024-2025), fokus pada keamanan pangan syariah.
Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Juara 3	- 5.010 mahasiswa program Ekonomi & Keuangan Syariah di 7 perguruan tinggi. - Kolaborasi dengan 200+ pesantren untuk kurikulum syariah dan inkubasi usaha berbasis pondok.
Literasi Ekonomi Syariah	Juara 3	- Kampanye literasi mencapai 1 juta masyarakat melalui <i>workshop</i> dan media digital. - Indeks literasi syariah provinsi naik ke 65% (dari 50% pada 2023).
Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Syariah	Juara 3	- Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) pada April 2024. - Peraturan Gubernur No. 1/2022 tentang Pengembangan Ekonomi Syariah, mendukung target wajib halal Oktober 2024.

Industri halal di Jawa Barat perlu disesuaikan dengan potensi setiap kota atau kabupaten. Misalnya, Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan sama-sama mengunggulkan sektor pangan halal. Kabupaten Cirebon



berfokus pada komoditas bahan baku daging halal karena banyaknya olahan masakan dari daging. Sedangkan Kuningan melakukan pendekatan sertifikasi halal pada panganan tape ketan yang merupakan salah satu makanan khasnya. Metode yang digunakan untuk menyarikan fundamental dalam pengembangan industri halal di setiap kota dan kabupaten digali berdasarkan permintaan pasar, kesiapan daerah untuk mendeklarasikan diri dan pemenuhan standar halal.

Program lainnya terkait ekonomi syariah di Jawa Barat adalah *One Pesantren One Product*, program dana bergulir kredit MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)-kredit tanpa bunga dan agunan, program UMKM naik kelas (UMKM juara), dan program koperasi juara. Pariwisata ramah muslim memiliki potensi besar karena Jabar menjadi top 5 destinasi pariwisata ramah muslim unggulan nasional. Hampir semua kabupaten/ kota di Jabar memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, seperti peninggalan bangunan sejarah Islam di Cirebon, wisata religi Manajemen Qolbu di Bandung, dan Kota Depok sebagai kota halal. *Fashion muslim* dapat dikembangkan dengan melakukan bazaar UMKM di Pusat Dakwah Islam. Jabar memiliki ekspor ekraf terbesar di Indonesia yang berkontribusi 34% nasional. Bandung berpotensi sebagai kiblat busana muslim Indonesia karena berkontribusi 20% perdagangan busana muslim.

Dana sosial syariah di Jabar memiliki potensi yang besar, yaitu 28 BAZNAS aktif dan 21 LAZ (rekomendasi BAZNAS). Program penyaluran ZISWAF di Jabar, yaitu untuk sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah. Indeks Zakat Nasional (IZN) di Jabar juga sudah baik, baik untuk indeks makro 0,80 maupun indeks mikro 0,83 di tahun 2019.

Pada tanggal 26 Mei 2025, Pemprov Jawa Barat mendapatkan Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2025. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan Republika. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi yang menunjukkan komitmen dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Anugerah tersebut bertujuan untuk mendorong pemda untuk lebih aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan literasi masyarakat terkait hal tersebut. Jawa Barat meraih penghargaan di 9 kategori (termasuk 3 gelar juara pertama) dari 12 kategori utama. Keberhasilan tersebut didasarkan pada capaian nyata Jabar dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, seperti peningkatan aset keuangan syariah, sertifikasi halal, serta penguatan filantropi dan pariwisata halal.



Gambar 8. Rekomendasi hasil translasi ekonomi halal ke Jawa Barat

ASPEK REKOMENDATIF

Jawa Barat sebagai pusat ekonomi syariah dengan kontribusi 15-20% terhadap PDB nasional sektor halal perlu dioptimalkan potensinya. Potensi sektor unggulan ekonomi syariah Jawa Barat, yaitu pariwisata ramah muslim, kuliner halal, fesyen halal dan kosmetik halal (KNEKS 2020). Hal yang direkomendasikan, yaitu penguatan ekosistem halal terintegrasi (target 7 juta produk bersertifikat halal nasional 2025), sinergi ekonomi hijau dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029, pengembangan pariwisata ramah muslim, inklusi keuangan syariah untuk UMKM, dan penyelarasan muatan ekonomi syariah daerah-nasional sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Barat No. 1/2022. Strategi ini difokuskan pada KDEKS Jawa Barat sebagai orkestrator, dengan target pertumbuhan sektor syariah 10-15% per tahun hingga 2029.

Tabel 5. Rekomendasi kebijakan dan strategi untuk ekonomi syariah dan industri halal di Jawa Barat

No.	Kebijakan/Strategi	Dasar Leverage SNSE	Keselarasan dengan Isu Strategis Jawa Barat	Implementasi Utama	Indikator Sukses (Target 2025-2029)
1	Pengembangan Klaster Industri Halal Terintegrasi dengan Bioteknologi	<i>Multiplier</i> efek sektor halal (1,8x terhadap PDB regional via SNSE), memanfaatkan interseksi produksi makanan/farmasi halal dengan rantai pasok syariah.	Penguatan ekosistem halal & bioteknologi (KNEKS 2025); posisi Jabar sebagai poros ekonomi syariah dengan potensi ekspor halal Rp 50 triliun.	Membangun kawasan industri halal di Bandung-Ciampelas dan Karawang; insentif pajak syariah untuk UMKM biotek halal.	2 juta produk halal bersertifikat; kontribusi 25% PDB Jabar dari sektor halal.
2	Program Sertifikasi dan Literasi Digital Halal untuk UMKM	<i>Leverage</i> inklusi keuangan syariah (efek 1,6x pada pendapatan rumah tangga via SNSE), meningkatkan akses pasar <i>e-commerce</i> halal.	Tantangan UKM halal (LPPOM MUI 2024); sinergi ekonomi kreatif-halal untuk stabilitas regional.	Kolaborasi KDEKS dengan BPJPH untuk pelatihan gratis; integrasi <i>platform</i> digital syariah seperti <i>Sharia Mall</i> Jabar.	80% UMKM halal tersertifikasi; peningkatan ekspor digital 30%.
3	Integrasi Ekonomi Hijau dalam Pariwisata dan Fesyen Halal	Efek <i>multiplier</i> pariwisata syariah (2,0x lapangan kerja via SNSE), selaras dengan transformasi berkelanjutan.	Pilar utama <i>Masterplan</i> Ekonomi Syariah 2025-2029 (ekonomi hijau); potensi pariwisata ramah muslim di Jabar (Rp 20 triliun/tahun).	Kembangkan <i>eco-tourism</i> halal di Pangandaran dan Garut; sertifikasi <i>green halal</i> untuk fesyen muslim.	5 juta wisatawan halal; 15% pertumbuhan sektor fesyen hijau.
4	Penyelarasan Inklusi Keuangan Syariah Daerah-Nasional	<i>Leverage</i> keuangan syariah (1,7x distribusi pendapatan via SNSE), mengurangi kesenjangan urban-rural.	Arahan Wapres Ma'ruf (2024) untuk inklusi syariah; uji publik penyelarasan muatan syariah 2025 (KNEKS).	Perluas <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) syariah di pedesaan; integrasi dengan SNSE Jabar untuk monitoring dampak.	50% populasi Jabar tercover keuangan syariah; penurunan kemiskinan 5%.
5	Simulasi Kebijakan Berbasis SNSE untuk Pengukuran Dampak	Analisis SNSE 55x55 (2022) untuk proyeksi <i>leverage</i> sektor syariah, termasuk simulasi kebijakan fiskal halal.	Strategi nasional Jabar mengambil peran strategis (Biro Perekonomian Jabar 2025); <i>Masterplan</i> Industri Halal 2023-2029.	Membentuk tim SNSE-KDEKS untuk simulasi tahunan; kolaborasi BPS Jabar dengan KNEKS.	Laporan SNSE tahunan; <i>Return on Investment</i> (ROI) kebijakan syariah >1,5x.

Pengujian rekomendasi kebijakan dengan model/simulasi

a. Model pertumbuhan eksponensial (*compound annual growth rate/CAGR*)

Pengujian ini digunakan untuk memastikan alternatif kebijakan efektif dalam implementasi dalam mencapai target ekonomi halal Jabar menjadi yang terdepan baik secara nasional maupun global di tahun 2029. Model simulasi yang digunakan adalah pertumbuhan eksponensial. Asumsi yang digunakan, yaitu nilai awal sektor halal Jabar 2025: Rp 500 triliun (berdasarkan estimasi proporsional dari kontribusi nasional 46,9% terhadap

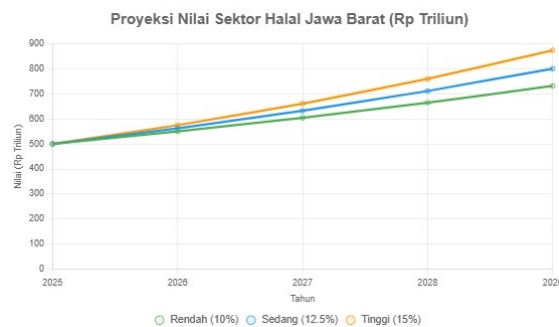


PDB dan PDRB Jabar ~Rp 2.900 triliun tahunan); skenario yang digunakan ada 3, yaitu rendah (10%), sedang (12,5%), dan tinggi (15%) pertumbuhan tahunan; periode prediksi 2025-2029. Hasil proyeksi disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Simulasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terhadap pertumbuhan sektor halal di Jawa Barat

Tahun	Rendah (10%) (Rp T)	Sedang (12,5%) (Rp T)	Tinggi (15%) (Rp T)
2025	500.00	500.00	500.00
2026	550.00	562.50	575.00
2027	605.00	632.81	661.25
2028	665.50	711.91	760.44
2029	732.05	800.90	874.50

Simulasi menunjukkan bahwa dengan implementasi rekomendasi di atas, sektor halal Jabar berpotensi mencapai Rp 732-874 triliun pada tahun 2029, atau terjadi peningkatan kumulatif 46-75% dari basis 2025. Efektivitas tergantung pada faktor eksternal seperti stabilitas global dan adopsi teknologi. Untuk mencapai target MEKSI, Jabar harus menjalankan setidaknya skenario sedang (12,5%), yang memerlukan sertifikasi 1 juta UMKM dan inklusi keuangan syariah 50%.



Gambar 9. Proyeksi nilai sektor halal Jabar (Rp Triliun) jika melakukan rekomendasi kebijakan

b. Model input-output syariah Jawa Barat

Model ini sebagai alat simulasi rekomendasi kebijakan berbasis data. Model *Input-Output* (I-O) Syariah adalah ekstensi dari model Leontief klasik yang mengintegrasikan: (i) prinsip syariah dalam alur produksi, konsumsi, dan investasi; (ii) sektor halal unggulan Jabar; (iii) sinergi dengan ekonomi hijau-sesuai MEKSI 2025-2029; dan (iv) inklusi keuangan syariah untuk UMKM. Tujuannya untuk mengukur efek pengganda (*multiplier*) dari kebijakan halal terhadap PDRB, lapangan kerja, dan ekspor.

Tabel 7. Struktur matriks I-O syariah Jawa Barat (7 sektor)

Sektor	Kode	Keterangan
1. Pertanian & Pangan Halal	AGR	Bahan baku kuliner halal
2. Kuliner Halal	KH	Restoran, catering, UMKM makanan
3. Fesyen Halal	FH	Tekstil, busana muslim, aksesoris
4. Kosmetik Halal	KOS	Sabun, skincare, parfum halal
5. Pariwisata Ramah Muslim	PRM	Hotel syariah, travel, wisata religi
6. Keuangan Syariah	FIN	Bank syariah, pembiayaan UMKM
7. Sektor Lain (Konvensional)	OTH	Industri, perdagangan, jasa lain

Tabel 8. Matriks transaksi antar sektor Tahun 2025 (Rp Miliar)

Input → Output	AGR	KH	FH	KOS	PRM	FIN	OTH	Permintaan Akhir	Total Output
AGR	120	800	50	100	80	20	300	1.520	3.000
KH	50	200	30	20	400	50	500	2.750	4.000
FH	80	100	300	150	200	80	600	1.490	3.000
KOS	60	50	120	180	100	40	400	1.050	2.000
PRM	100	600	200	80	500	150	800	3.570	6.000
FIN	50	150	180	100	300	200	1.000	1.020	3.000
OTH	400	800	600	400	1.200	600	5.000	8.000	17.000
Nilai Tambah	2.140	1.300	1.520	970	3.220	1.860	8.400	–	19.410
Total Input	3.000	4.000	3.000	2.000	6.000	3.000	17.000	–	60.000

Catatan: angka di atas berdasarkan: PDRB Jabar 2025 ≈ Rp 2.900 T → Total output I-O ≈ Rp 60 T (sektor formal); Kontribusi sektor halal ≈ 17–20% PDRB

Tabel 9. Perhitungan matriks koefisien teknis (A)-koefisien input

	AGR	KH	FH	KOS	PRM	FIN	OTH
AGR	0,040	0,200	0,017	0,050	0,013	0,007	0,018
KH	0,017	0,050	0,010	0,010	0,067	0,017	0,029
FH	0,027	0,025	0,100	0,075	0,033	0,027	0,035
KOS	0,020	0,013	0,040	0,090	0,017	0,013	0,024
PRM	0,033	0,150	0,067	0,040	0,083	0,050	0,047
FIN	0,017	0,038	0,060	0,050	0,050	0,067	0,059
OTH	0,133	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,294

$$\text{Rumus: } a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}$$

Contoh perhitungan: $a_{KH-AGR} = \frac{800}{4.000} = 0,20 \rightarrow 1 \text{ Rp output KH membutuhkan } 0,20 \text{ Rp input AGR}$

Tabel 10. Efek pengganda output (output multiplier)-menggunakan matriks Leontif invers

Sektor	Multiplier	Artinya
PRM	2,45	1 Rp permintaan akhir PRM → 2,45 Rp total output
KH	1,98	1 Rp kuliner halal → 1,98 Rp output ekonomi
FH	1,85	Fesyen halal: efek rantai pasok tinggi
KOS	1,72	Kosmetik: efek sedang
AGR	1,68	Bahan baku: efek hulu
FIN	1,78	Keuangan syariah: katalis inklusi

$$\text{Rumus: } (I - A)^{-1} = \text{Matriks Pengganda Total}$$

Rata-rata multiplier sektor halal = 1,95 → lebih tinggi daripada sektor konvensional (1,65)

Simulasi rekomendasi kebijakan 2025-2029

- Kebijakan 1: sertifikasi 1 juta produk halal gratis
 - Efek: +Rp 500 Miliar permintaan akhir (KH + FH + KOS)
 - Hasil simulasi:
 - Total output naik: Rp 950 Miliar
 - PDRB naik: Rp 480 Miliar
 - Lapangan kerja: +12.000 tenaga kerja (asumsi 1 lapangan kerja = Rp 40 juta output)



- Kebijakan 2: investasi hotel syariah Rp 2 triliun
 - Efek: +Rp 2 T permintaan akhir PRM
 - Hasil:
 - Total output: +Rp 4,9 Triliun
 - PDRB: +Rp 2,6 Triliun
 - Lapangan kerja: +65.000
- Kebijakan 3: pembiayaan syariah UMKM Rp 5 triliun (FIN)
 - Efek: +Rp 5 T permintaan akhir FIN
 - Hasil:
 - Total output: +Rp 8,9 Triliun
 - PDRB: +Rp 4,8 Triliun
 - Ekspor halal: +Rp 1,2 Triliun

Tabel 11. Proyeksi kontribusi sektor halal ke PDRB Jawa Barat jika menerapkan rekomendasi kebijakan

Tahun	PDRB Jabar (Rp T)	Kontribusi Halal (Rp T)	% PDRB
2025	2.900	550	19,0%
2026	3.045	660	21,7%
2027	3.197	792	24,8%
2028	3.357	950	28,3%
2029	3.525	1.140	32,3%

Keterangan: target MEKSI akan tercapai dengan kontribusi >30% PDRB pada 2029

Tabel 12. Proyeksi penurunan emisi di Jawa Barat jika menerapkan rekomendasi kebijakan

Sektor	Emisi CO ₂ per Rp 1 M output (kg)	Target Pengurangan 2030
KH	120	-40% (menggunakan energi terbarukan)
FH	180	-50% (bahan daur ulang)
PRM	90	-30% (eco-hotel)

Simulasi: jika 50% UMKM halal menggunakan energi hijau → pengurangan emisi 1,2 juta ton CO₂/tahun

c. Model *Computable General Equilibrium* (CGE) untuk Ekonomi Halal Jawa Barat

CGE adalah model ekonomi keseimbangan umum yang: (i) mensimulasikan seluruh perekonomian (produksi, konsumsi, investasi, perdagangan, pemerintah, rumah tangga); (ii) memastikan keseimbangan pasar (*supply = demand*) di semua sektor; (iii) Mengukur efek kebijakan secara simultan (langsung, tidak langsung, dan umpan balik). CGE lebih akurat untuk mensimulasi dampak pelaksanaan rekomendasi kebijakan untuk jangka menengah-panjang (2025-2029).

Rekomendasi kebijakan berbasis simulasi adalah dengan mempercepat *Bandung Halal Valley* (BHV) untuk di ground breaking pada kuartal I 2026, membentuk badan pengelola BHV yang terdiri dari BUMD syariah dan KDEKS, melakukan integrasi ke RPJMD 2025-2029 dengan menargetkan PDRB halal > 35%, dan mereplikasi model BHV ke Bogor dan Cirebon melalui *Bogor Halal Corridor* dan *Cirebon Halal Port*. *Bandung Halal Valley* bukan hanya proyek infrastruktur, namun ini adalah mesin pertumbuhan syariah berkelanjutan yang akan (i) meningkatkan PDRB Jabar 35% di atas *baseline*, (ii) menciptakan 420.000 lapangan kerja halal, (iii) mengurangi emisi 2,1 juta ton CO₂, dan (iv) menjadikan Jabar provinsi halal terdepan dunia pada 2029. Ekonomi halal bukan hanya bernilai ibadah tetapi juga investasi terbaik bagi masa depan Jawa Barat.

Tabel 13. Data dasar SNSE syariah Jabar 2025

(Rp Triliun)	RT	Perusahaan	Pemerintah	Bank Syariah	Dunia	Total
RT	–	300	50	100	50	500
Perusahaan	400	200	100	150	150	1.000
Pemerintah	80	50	–	20	10	160
Bank Syariah	120	180	30	–	20	350
Dunia	100	270	10	30	–	410
Total	700	1.000	190	300	230	2.420

Simulasi kebijakan CGE syariah Jabar

➤ Kebijakan 1: Pembiayaan Syariah 100% kepada UMKM

Dampak	Nilai
Pertumbuhan PRM	+14,2%
Inflasi	+1,1% (sementara)
Lapangan kerja halal	+85.000
Zakat terkumpul	+Rp 45 T
Efek umpan balik	Bank syariah ekspansi → suku bagi naik → tabungan ↑

➤ Kebijakan 2: subsidi sertifikasi halal Rp 1 T

Dampak	Nilai
Output KH + FH + KOS	+Rp 2,8 T
Ekspor halal	+Rp 0,9 T
Harga pangan halal	-2,3%
Multiplier fiskal	2,8

➤ Kebijakan 3: kawasan ekonomi syariah hijau (Bandung Halal Valley)

- Investasi Rp 5 T (hotel hijau, pabrik daur ulang fesyen)
- Hasil 2029:
 - PDRB +3,1%
 - Emisi CO₂ ↓ 1,8 juta ton
 - Wisatawan muslim +1,2 juta orang
 - ROI sosial: 1:4,2



Keterangan: PDRB 2029: Rp 4.260 T (+21% vs baseline) Kesejahteraan (utilitas rumah tangga): +18%

Gambar 10. Proyeksi PDRB Jawa Barat (Rp Triliun) jika melakukan rekomendasi kebijakan



Kebijakan yang Disimulasikan

Nama Kebijakan	Bandung Halal Valley (BHV) 2026
Tujuan	Menjadikan Bandung sebagai <i>global halal hub</i> melalui kawasan ekonomi terpadu syariah-hijau
Komponen Utama	1. Investasi infrastruktur halal: Rp 5 Triliun (2026–2028) 2. Sertifikasi halal massal: 500.000 UMKM gratis 3. Pembiayaan syariah: Rp 10 Triliun (mudharabah + ijarah) 4. <i>Eco-Halal Industrial Park</i> (energi terbarukan, zero waste)
Pelaksana	KDEKS Jabar, Pemprov, Bank Syariah, BPJPH, KNEKS
Periode Simulasi	2026 – 2029

Shock Kebijakan (Input Simulasi)

Variabel	Shock (2026)	Keterangan
Investasi PRM	+Rp 3,0 T	Hotel syariah, <i>convention center</i> halal
Investasi FH + KOS	+Rp 2,0 T	Pabrik fesyen & kosmetik hijau
Permintaan akhir PRM	+Rp 1,5 T	Wisatawan muslim internasional
Produktivitas halal	+8%	Efek sertifikasi & teknologi hijau
Pembiayaan syariah	+Rp 10 T	PSR 70:30 (bank:UMKM)
Zakat produktif	+Rp 0,3 T	Reinvestasi ke UMKM halal

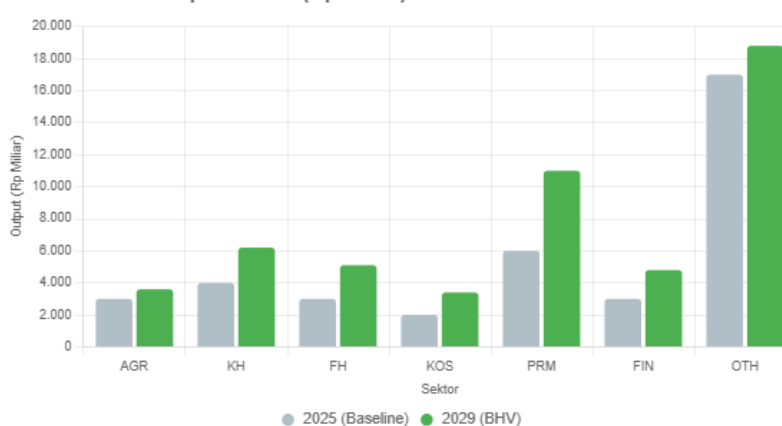
Hasil Simulasi CGE Syariah

1. Dampak Makroekonomi (2026–2029)

Indikator	2025 (Baseline)	2029 (BHV)	Δ (%)
PDRB Jabar	2.900 T	3.920 T	+35,2%
Pertumbuhan rata-rata	5,2%	10,8%	+5,6 ppt
Inflasi	3,1%	3,8%	+0,7 ppt (terkendali)
Nilai Tukar Riil	100	94	Apresiasi 6% (ekspor halal kuat)

2. Dampak Sektoral (Output di 2029)

Output Sektor (Rp Miliar) – Baseline vs BHV 2029



Keterangan: Sektor PRM naik 83%, FH +70%, KOS +70%; kuliner halal menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua

Gambar 11. Dampak sektoral output jika melakukan rekomendasi kebijakan

3. Dampak multiplier

Sektor	Output Multiplier	Income Multiplier	Lapangan Kerja (per Rp 1 M)
PRM	2,68	1,42	18 orang
FH	2,35	1,28	22 orang
KOS	2,21	1,19	20 orang
Rata-rata Halal	2,41	1,30	20 orang

1 Rp investasi BHV → 2,41 Rp output total

4. Dampak Sosial dan inklusi

Indikator	Hasil
Lapangan Kerja Baru	+420.000 (80% UMKM halal)
Pengurangan Kemiskinan	-2,8 ppt (dari 7,1% → 4,3%)
Zakat Terkumpul	Rp 98 Triliun (2026–2029)
Reinvestasi Zakat	60% ke pendidikan & kesehatan syariah
Indeks Gini	0,38 → 0,35 (<i>lebih merata</i>)

5. Dampak Lingkungan

Indikator	Pengurangan
Emisi CO ₂	-2,1 juta ton (2029)
Penggunaan Air	-18% di FH & KOS
Limbah Tekstil Daur Ulang	75%
Energi Terbarukan	45% kebutuhan BHV

Target NZE Jabar 2060 dipercepat 12 tahun

6. Dampak Fiskal dan Keuangan Syariah

Indikator	Nilai
Penerimaan Pajak Daerah	+Rp 180 T (2026–2029)
Pembiayaan Syariah Outstanding	Rp 28 T → Rp 62 T
NPL Syariah	1,2% (turun dari 2,1%)
Ekspor Halal	Rp 1,8 T → Rp 4,2 T (+133%)

KESIMPULAN

Tujuh klaster utama PDB syariah adalah makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi syariah, selahan farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, dana sosial syariah, dan syariah lainnya. Keterbatasan kajian tidak menggunakan pendekatan indeks untuk sektor nomenklatur pasti PDB syariah, hanya menggunakan konkordansi berdasarkan nomenklatur KBLI. Jadi tidak bisa menggambarkan sektor *leverage* syariah secara tepat. Rekomendasi yang memanfaatkan PDB syariah antara lain industri halal (unggas dan produknya; minyak hewani dan minyak nabati; gula), UMKM halal (penyediaan makanan dan minuman), UMKM halal (barang kertas dan kardus), ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional (karet remah dan karet asap melalui kerja sama ITRC dan ANRPC), dan pembiayaan syariah melalui optimalisasi dana sosial syariah (ZISWAF). Hasil translasi rekomendasi kebijakan ekonomi syariah dan industri halal untuk Jawa Barat difokuskan pada sektor pangan halal, pariwisata ramah muslim, dan fesyen. Jawa Barat juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial syariahnya (ZISWAF).



REFERENSI

- Almas B, Sjafruddin, Zainuri H. (2024). Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Proceedings of International Conference on Social Science Political Science and Humanities* 4:00040. DOI: 10.29103/icospolhum.v4i.469.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Tabel Kesesuaian KBLI 2020- KBLI 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2025a). *Menyusun Fondasi Ekonomi Tematik Indonesia: PDB Satelit Syariah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2025b). *Tabel Input-Output Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Balli F, Chowdhury MIH, Bruin AD. (2022). Transition to Islamic Equities: Systematic Risk and Shari'ah Compliance. *Global Finance Journal* 51 (1): 100552.
- Firdaus CB. (2025). Integrating Sharia Financial Mechanisms with Indonesia's Halal Economy: Opportunities, Challenges, and Strategies for Sustainable Growth. *Journal of Islamic Economic Insights* 1(1): 15-28.
- Fischer J, Nisa EF. (2025). Emerging Middles: Class, Development and The Halal Economy in Indonesia and Malaysia. *Research in Globalization* 10: 1 – 10.
- Ghufron F. (2022). Urgensi Saintifikasi Halal. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/02/urgensi-saintifikasi-halal?> [06 Juli 2025].
- Jailani N, Adinugraha HH. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences* 6(1): 44-53. DOI: 10.18196/jerss.v6i1.13617.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]. (2020). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. Jakarta: KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]. (2021). *Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]. (2023). *Masterplan Industri Halal Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]. (2025). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat [LPEM] UI. (2023). *White Paper: Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029*. Jakarta: LPEM FEB UI.
- Machmud. (2020). *Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Karet Berkelanjutan Melalui Pendekatan Rantai Pasok di Provinsi Jambi*. Disertasi. Bogor: SB IPB.
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia. *Economies* 11(4): 111. <https://doi.org/10.3390/economies11040111>.
- Nugroho YD. (2021). Analisis Dampak Keterkaitan dan Pengganda sebagai Identifikasi Lever Sector (Pendekatan Tabel Input-Output 2020 Estimasi). *Seminar Nasional Official Statistics 2021*.
- Qizam I, Berakon I, Ali H. (2024). The Role of Halal Value Chain, Sharia Financial Inclusion, and Digital Economy in Socio-Economic Transformation: A Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing* 16(3): 810-840.
- Sahara. (2020). *Analisis Input-Output: Perencanaan Sektor Unggulan*, Bogor: IPB Press.
- State of the Global Islamic Economy [SGIE]. 2024. *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: DinarStandard.
- Yildirim R, Masih M, Bacha OI. (2018). Determinants of Capital Structure: Evidence from Shari'ah Compliant and Non-Compliant Firms. *Pacific-Basin Finance Journal* 51: 198 – 219.